

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR v

PENGANTAR EDITOR vii

## BAGIAN 1

REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK 1

---

<b>BAB 1 REFORMASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI BERDASARKAN AMENDEMEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945</b>	<b>3</b>
A. Desentralisasi: Makna dan Urgensi	6
B. Konsep Reformasi Kebijakan	13
1. Filosofi Dasar	13
2. Pembagian Susunan Pemerintahan	14
3. Peran dan Fungsi Utama Pemerintah Daerah	15
4. Penggunaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	15
5. Model Organisasi Pemerintah Daerah	16
6. Mekanisme Transfer Kewenangan	17
7. Pola Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	18
8. Sistem Kepegawaian	19
9. Sistem Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	20
10. Sistem Pengelolaan Keuangan Antar-Asas	21
11. Kedudukan Kecamatan	21
12. Pengaturan Desa	22

<b>BAB 2 REFORMASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANAU</b>	<b>25</b>
A. Analisis Stakeholder	30
B. Identifikasi Stakeholders	32
1. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Ekosistem Danau	34
<b>BAB 3 MELURUSKAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA</b>	<b>39</b>
A. Potret Reformasi Birokrasi Dewasa Ini	44
B. Memperkuat Spirit Kebijakan Reformasi Birokrasi	54
1. <i>As-Shidqu</i>	54
2. <i>Al-Amanah wal-Wafa bil 'ahd</i>	55
3. <i>Al-'Adalah</i>	56
4. <i>At-Ta'awun</i>	56
5. <i>Istiqamah</i>	57
<b>BAB 4 PALU ZERO POVERTY: MENGURAI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>61</b>
A. Evaluasi Kebijakan Publik	66
1. Kemiskinan	70
<b>BAGIAN 2 KEBIJAKAN PUBLIK</b>	<b>81</b>
<b>BAB 5 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK</b>	<b>83</b>
A. Formulasi Kebijakan	83
B. Implementasi Kebijakan Publik	85
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	85
2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik	85
C. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan	86
1. Pemerintahan Desa dalam Sistem Administrasi	87
2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa	88
D. Pembangunan Masyarakat Desa	89
1. Proses Pembangunan Pedesaan	89
E. Pemberdayaan Masyarakat Desa	90
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Rangka Pengembangan Pedesaan	90

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	91
3. Tahap-tahap Pemberdayaan Desa	92
F. Pelayanan Terhadap Masyarakat	94
G. Konsep Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia	96
H. Otonomi Daerah	97
1. Pengertian Otonomi Daerah	97
i. Pembinaan Terhadap Masyarakat	99
1. Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi	99
2. Pembinaan Masyarakat Desa pada Bidang Hukum	99
3. Pembinaan Masyarakat pada Bidang Agama	99
4. Pembinaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan	100
J. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia	101
<b>BAB 6 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK</b>	<b>105</b>
A. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan APBD	112
1. Tujuan Perumusan Musrenbang Tidak Tepat Sasaran	113
2. Perumusan Musrenbang Kurang Melibatkan Masyarakat	113
3. Pelaksanaan Musrenbang Kurang Melibatkan Masyarakat	114
4. Program Musrenbang Hanya Dinikmati oleh Elite	115
5. Kolusi dalam Perumusan Musrenbang Kelurahan	115
6. Program dalam Musrenbang Tidak Terarah dan Kurang Bermakna Positif	116
B. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan APBD	117
1. Program Pembangunan Tanpa Usulan Masyarakat dan Tak Sesuai Kebutuhan Masyarakat	117
2. Perumusan Program Musrenbang Tak Sejalan dengan Aturan Hukum	117
3. Peran Masyarakat Dibatasi dalam Musrenbang	118
4. Manipulasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	122
C. Reformasi Formulasi Kebijakan APBD	122
<b>BAB 7 IMPLEMENTASI REFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO</b>	<b>125</b>
A. Teori Implementasi	127

B.	Reformasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto	132
<b>BAB 8 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)</b>		
A.	Perpajakan	140
B.	Kebijakan Perpajakan	141
C.	Maksud dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	144
1.	Manfaat atau Keuntungan Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak)	145
D.	<i>Tax Amnesty</i> dan <i>Sunset Policy</i>	146
1.	Penerapan <i>Tax Amnesty</i> sebagai Alternatif	147
2.	Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak <i>Tax Amnesty</i>	149
E.	Kebijakan Reformasi Perpajakan	150
F.	Praktik-praktik <i>Tax Amnesty</i> di Berbagai Negara	162
1.	Afrika Selatan	162
2.	India	162
3.	Irlandia	163
4.	Rusia	164
5.	Amerika Serikat	164
G.	Perbandingan Pengampunan Pajak di Indonesia	165
<b>BAB 9 KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>		
A.	Pendekatan Penataan Kelembagaan	174
1.	Aspek Yuridis	175
2.	Aspek Kebutuhan Empiris	176
3.	Aspek Akademis	178
B.	Aspek-aspek yang Dipertimbangkan dalam Penataan Kelembagaan	184
1.	Aspek Kewenangan	185
2.	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	186
3.	Aspek Keuangan	187
4.	Aspek Teknologi	188
5.	Aspek Kebutuhan Pelayanan	190
6.	Aspek Nilai Strategis Daerah	191
C.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	194

### **BAGIAN 3 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK** 213

<b>BAB 10 REFORMULASI DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN</b>		
A.	Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	218
B.	Pelayanan Pembuatan Surat Akte Kelahiran	222
C.	Optimalisasi Kinerja Aparatur	225
<b>BAB 11 PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
A.	Hakikat Pelayanan Publik	237
B.	Pemerintahan Desa	240
C.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik	242
D.	Penerapan Kualitas Pelayanan Publik	245
E.	Implementasi Kebijakan UUD Desa di Kecamatan Hampan Perak	249
F.	Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Hampan Perak	253
<b>BAB 12 POLICY PARTNERSHIP DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA</b>		
A.	Konsep Kerja Sama ( <i>Partnership</i> )	261
1.	<i>Partnership</i> dalam Mewujudkan Kemandirian Desa	269

### **BAGIAN 4 KEBIJAKAN DAN OTONOMI DAERAH** 279

<b>BAB 13 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM KEBUN SEKOLAH UNTUK MENGATASI KEKURANGAN GIZI PADA ANAK</b>		
A.	Kekurangan Gizi (Malnutrisi)	284
1.	Pendekatan Partisipasi	285
2.	Alternatif Kebijakan dan Program	286
B.	Akar Masalah dan Penyebab	287
1.	Partisipasi Siswa	289
C.	Analisis Model Alternatif Kebijakan	293

<b>BAB 14 SENJAKALA OTONOMI DAERAH</b>	<b>297</b>
A. Otonomi Kepentingan Elite	302
B. Melebarnya Ketimpangan	304
C. Evaluasi Kebijakan	309
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>311</b>
<b>PARA PENULIS</b>	<b>333</b>